

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kolaborasi dalam perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Padang melibatkan berbagai pihak, termasuk BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Sosial, PT. Damko Manggala Utama, dan Rumah BUMN Padang. Masing-masing pihak memiliki peran strategis dalam mendukung program ini, dengan tujuan utama memperluas jangkauan peserta, khususnya pekerja rentan dan informal, agar memperoleh perlindungan ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai proses kolaborasi dalam perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Padang, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan teori *collaborative governance regime* yang dikemukakan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Padang sudah menunjukkan kesetaraan dalam prosesnya, hal ini bisa dianalisis dari variabel dinamika kolaborasi, yaitu proses dalam kolaborasi sudah terpenuhi dengan adanya payung hukum yang mengikat setiap *stakeholder*. Selain itu, dimensi ketergantungan satu sama lain juga menunjukkan bahwa setiap *stakeholder* yang terlibat juga menunjukkan alasan yang kuat dan saling terkait untuk menjalankan peran masing-masing.

Namun, hasil dari kolaborasi ini masih belum optimal, meskipun telah berlangsung selama kurang lebih dua tahun. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Ditinjau berdasarkan teori yang peneliti gunakan, dimensi pertama kepemimpinan dari *leading sector* yakni pemda yang masih belum menjadikan

program ini sebagai prioritas utama. Lalu dimensi tindakan kolaboratif, strategi yang diterapkan dalam memperluas kepesertaan masih kurang inovatif, yang sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan sumber daya baik manusia maupun anggaran. Lalu pada hasil kolaborasi, dampak yang ditimbulkan masih belum signifikan dengan ditandai masih rendahnya capaian pekerja informal terlindungi di Kota Padang.

6.2 Saran/ Rekomendasi

Berikut beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian mengenai *collaborative governance* dalam perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Padang:

1. Perlunya dilakukan peningkatan koordinasi dan pembagian peran antar pemangku kepentingan yang terlibat, dengan diadakannya forum diskusi kelompok yang melibatkan semua *stakeholder*, karena sejauh ini proses kolaborasi masih dilakukan secara terpisah, yang mengakibatkan komunikasi dan sinergi belum menyeluruh.
2. Program jaminan sosial ketenagakerjaan bisa dijadikan sebagai program prioritas utama pemerintah daerah, agar permasalahan pendanaan, strategi pelaksanaannya bisa menjadi fokus utama oleh *stakeholder* terkait.
3. Pembiayaan atau anggaran yang menjadi permasalahan utama bisa dilakukan pencarian pendanaan alternatif, seperti memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kota Padang atau mengalokasikan anggaran daerah secara lebih terstruktur agar lebih banyak pekerja rentan yang terlindungi.

4. Mengadopsi strategi yang telah dijalankan oleh wadah perisai PT. Damko Manggala Utama Agen Perisai dalam mengakuisisi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan, yang bisa diterapkan juga kepada wadah perisai lainnya.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan kolaborasi yang dilakukan oleh stakeholder dalam perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Padang dapat berjalan lebih optimal, memberikan perlindungan sosial yang lebih luas bagi pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di Kota Padang secara keseluruhan.

